



CSIS
INDONESIA



Peluncuran Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2024

Senin, 1 Juli 2024
CSIS Indonesia, Jakarta



Outline

1.

Pendahuluan & Kilasan Laporan

2.

Temuan Laporan Utama: Prospek dan Tantangan Ekonomi Keberlanjutan di Tengah Ancaman Fragmentasi Global

3.

Temuan Laporan Khusus: Aspek Keberlanjutan dalam Tata Kelola Kebijakan Mineral Kritis di Indonesia

Research

Network

Data

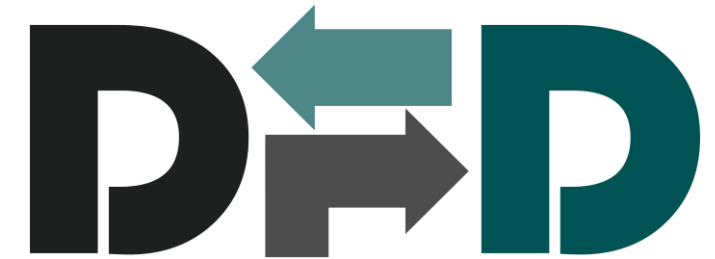
Model
Development

Flagship
Report

Capacity
Building

Policy
Discussion

Dashboard



Decarbonization for Development
Lab Hosted by CSIS Indonesia

DfD Lab
2024-2025

**Call for
Proposal**

**DfD Lab
Lecture**

2025 STIR

**DfD Lab
Dashboard**

A program to **improve climate policy research** and exchange of **knowledge** among key stakeholders with focus on **trade-industry-investment policy nexus** in Indonesia

Mengapa Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan?



Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2024:

Prospek dan Tantangan Ekonomi Berkelanjutan di Tengah Dinamika Global



Bagian II Laporan Khusus

Aspek Keberlanjutan dalam Tata Kelola Mineral Kritis di Indonesia





Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 masih terbatas dan dibayangi tekanan inflasi, faktor geopolitik dan ancaman perubahan iklim.



Perdagangan dan penanaman modal asing global yang cenderung menurun di tahun 2023 memperlihatkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.



Pertumbuhan perdagangan dan investasi berkelanjutan lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan dan investasi secara umum. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan kebijakan yang lebih fasilitatif untuk meningkatkan daya saing.



Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan untuk mendukung perdagangan dan investasi berkelanjutan. Misalnya, taksonomi hijau yang sudah diinisiasi sejak tahun 2022 serta kebijakan carbon pricing.

Kilasan Laporan



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2024:

Prospek dan Tantangan Ekonomi Berkelanjutan di Tengah Dinamika Global



2024



CSIS
INDONESIA

Kilasan Laporan

Bagian II Laporan Khusus

Aspek Keberlanjutan dalam Tata Kelola Mineral Kritis di Indonesia



Kebijakan mineral kritis harus lebih strategis dengan pertimbangan lintas-disiplin serta pendekatan rantai nilai global.



Diversifikasi mitra investasi di mineral kritis menjadi kebutuhan untuk memperkaya referensi praktik berkelanjutan dan mempertahankan akses pasar & daya saing produk-produk ramah lingkungan di tengah situasi geopolitik saat ini.



Kebutuhan untuk melakukan diversifikasi tersebut tentu mensyaratkan penyelesaian tumpang tindih kewenangan antar K/L, pusat-daerah, dan antara pemerintah dengan aktor non-pemerintah lain.



Indonesia harus lebih aktif untuk dapat bergabung dalam berbagai inisiatif yang memegang norma rantai nilai mineral berkelanjutan dan mempromosikan melalui instrumen kebijakan luar negeri dimiliki.



Laporan Utama

Prospek dan Tantangan Ekonomi
Keberlanjutan di Tengah
Ancaman Fragmentasi Global

Perkembangan Ekonomi Global

Tantangan Global

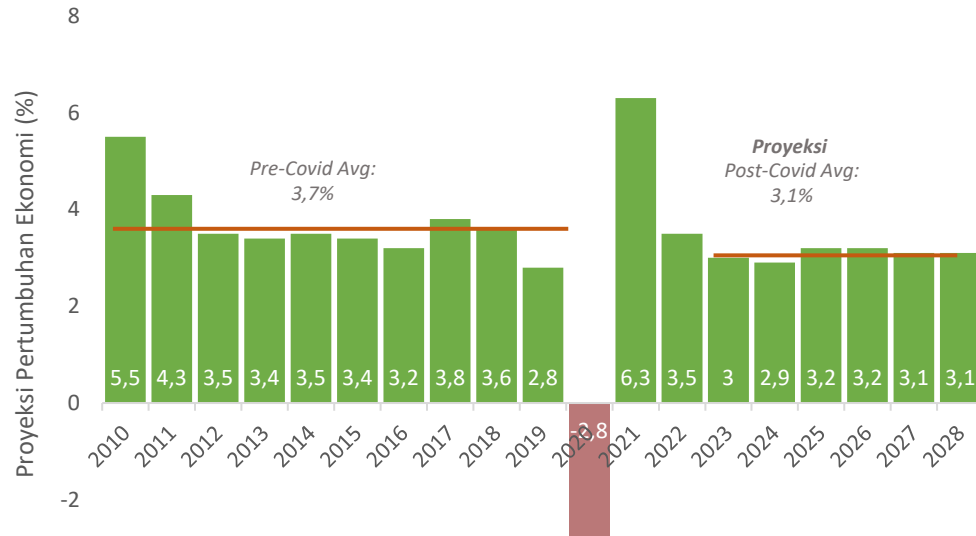
Perubahan demografi

Peningkatan teknologi

Kelangkaan sumber daya dan perubahan iklim

Perubahan kekuatan ekonomi dunia dan geopolitik

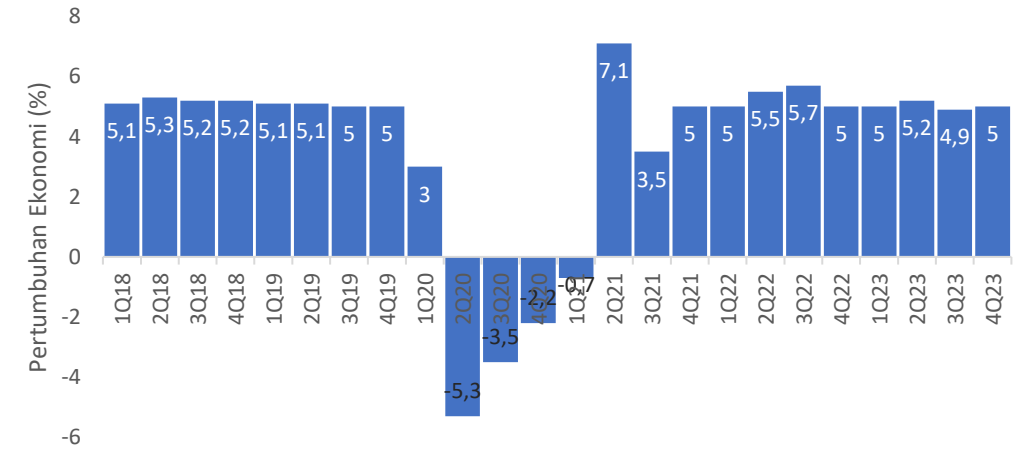
Integrasi dan disintegrasi perdagangan dan keuangan internasional



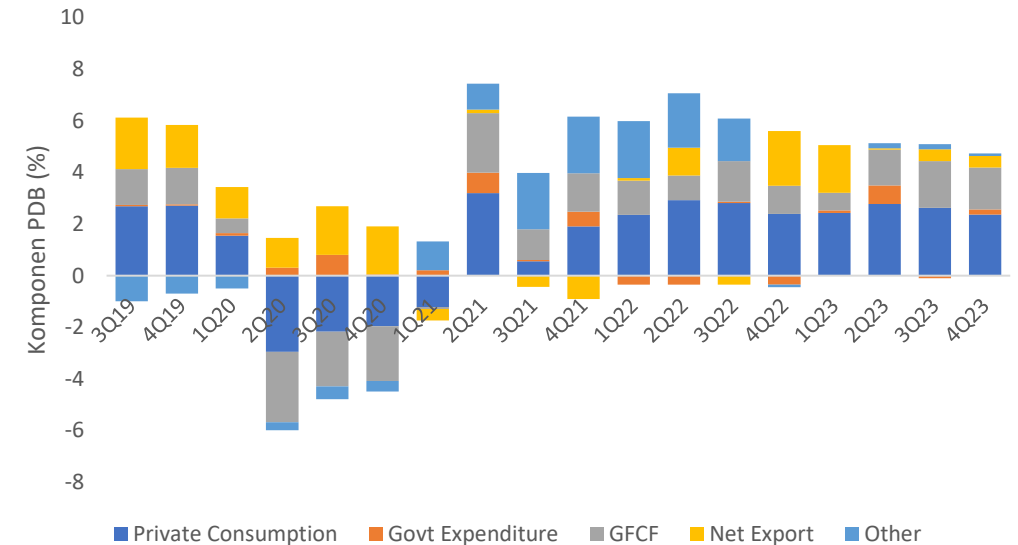
Recovery pascapandemi dibayangi stagnasi pertumbuhan, tekanan inflasi, resiko geopolitik, dan ancaman perubahan iklim.

Perkembangan Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia kembali tumbuh pada kisaran 5% didorong oleh konsumsi dalam negeri.

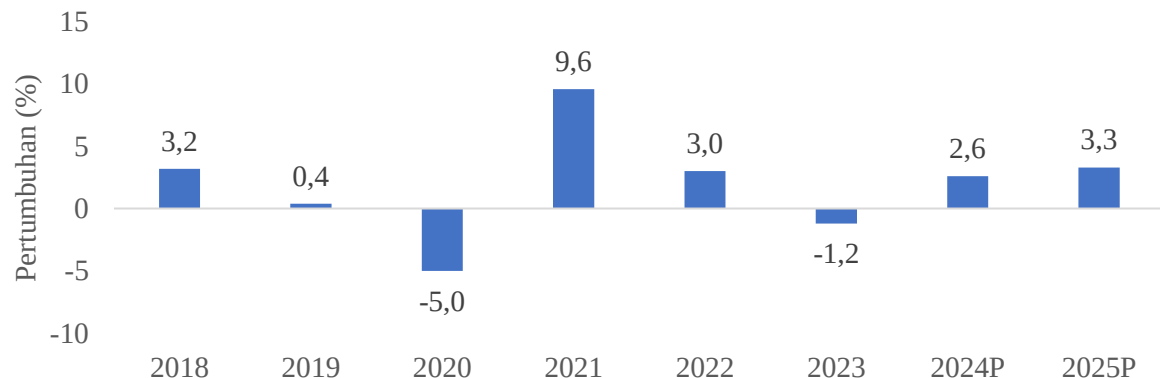


Mengandalkan konsumsi rumah tangga memiliki resiko terhadap keberlanjutan.

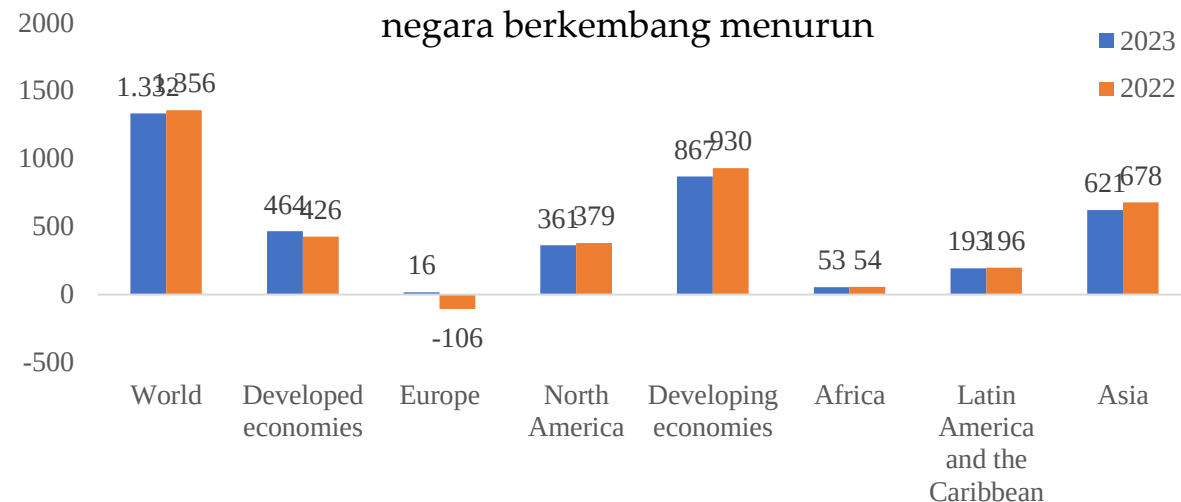


Perkembangan Perdagangan dan Investasi

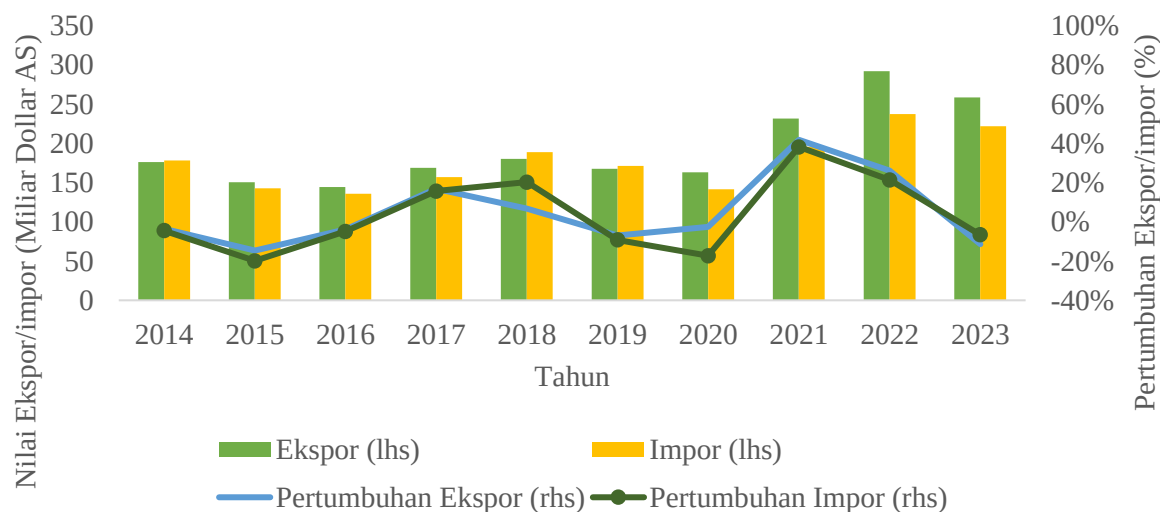
Perdagangan global melambat, namun diproyeksikan *rebound* tahun 2024-2025



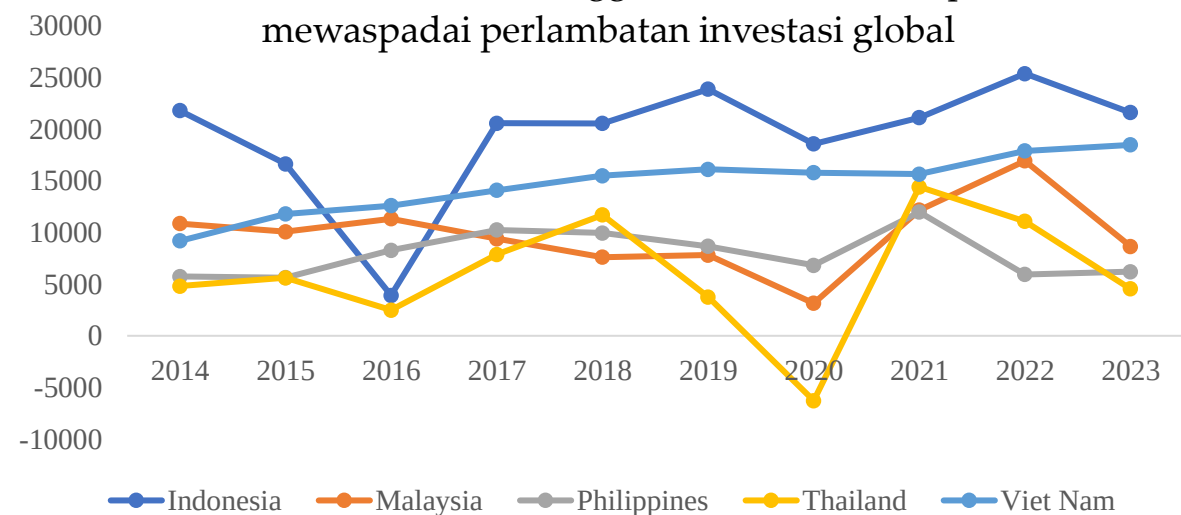
Tren PMA global ke negara maju tumbuh, sedangkan negara berkembang menurun



Indonesia memerlukan daya pengungkit baru untuk meningkatkan kinerja perdagangan



Minat investor masih tinggi namun Indonesia perlu mewaspadai perlambatan investasi global



Kinerja, Tantangan dan Prospek Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan: Global

2000-2020

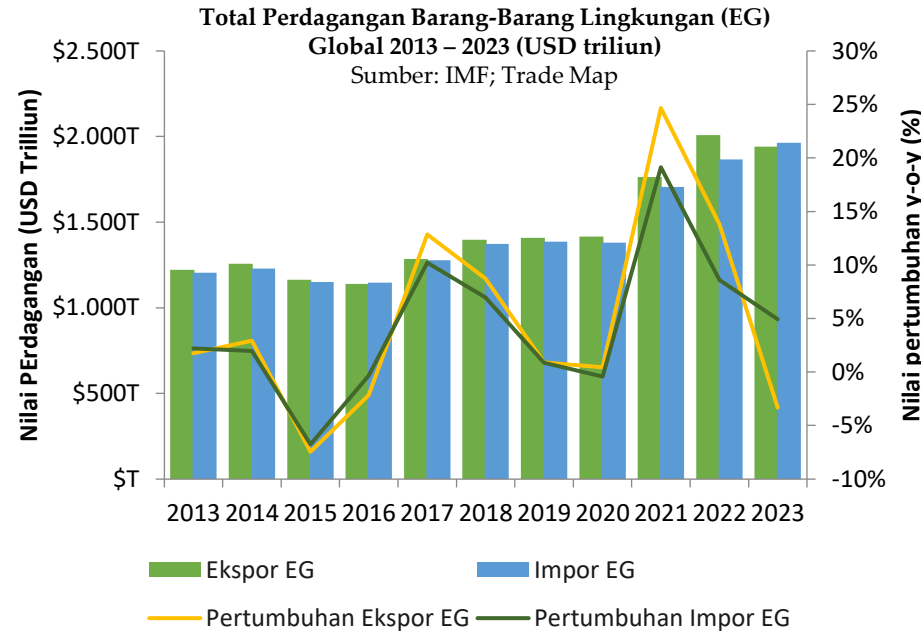
Perdagangan *environmental goods* (EGs) berkembang pesat di pasar global, hampir 2,5 kali lipat

2020

Perdagangan EG, mencakup 124 pos tarif HS-6, menyumbang 5% perdagangan global

2023

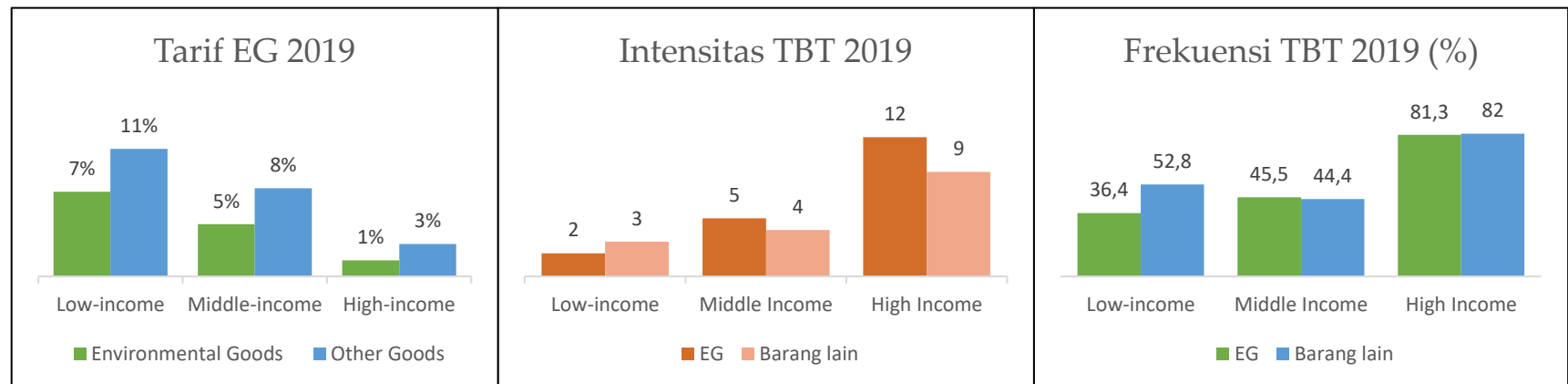
Perdagangan EGs tumbuh sebesar 4% (mencapai rekor nilai gabungan USD 1,9 triliun)



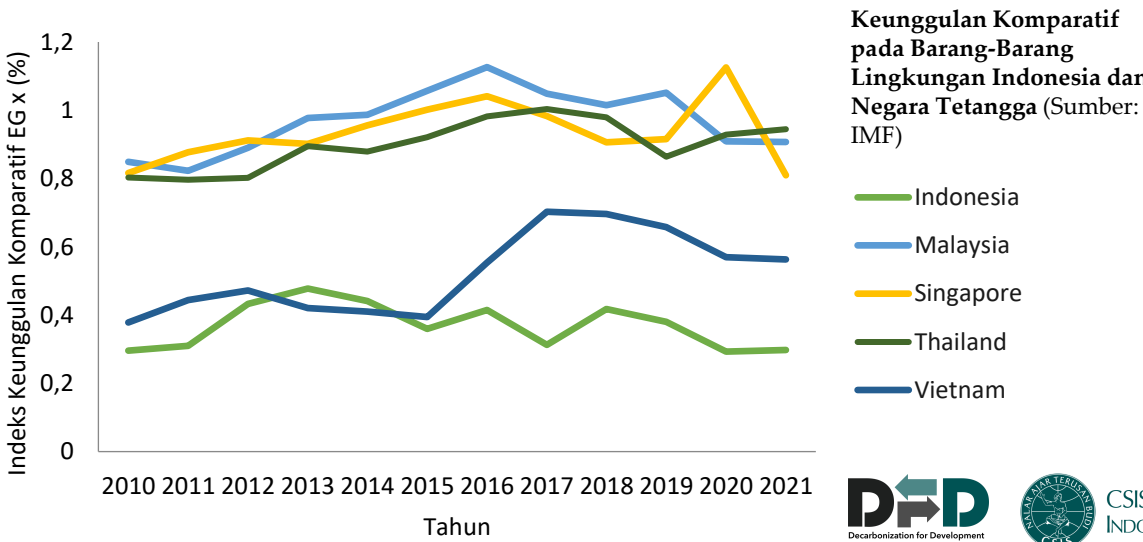
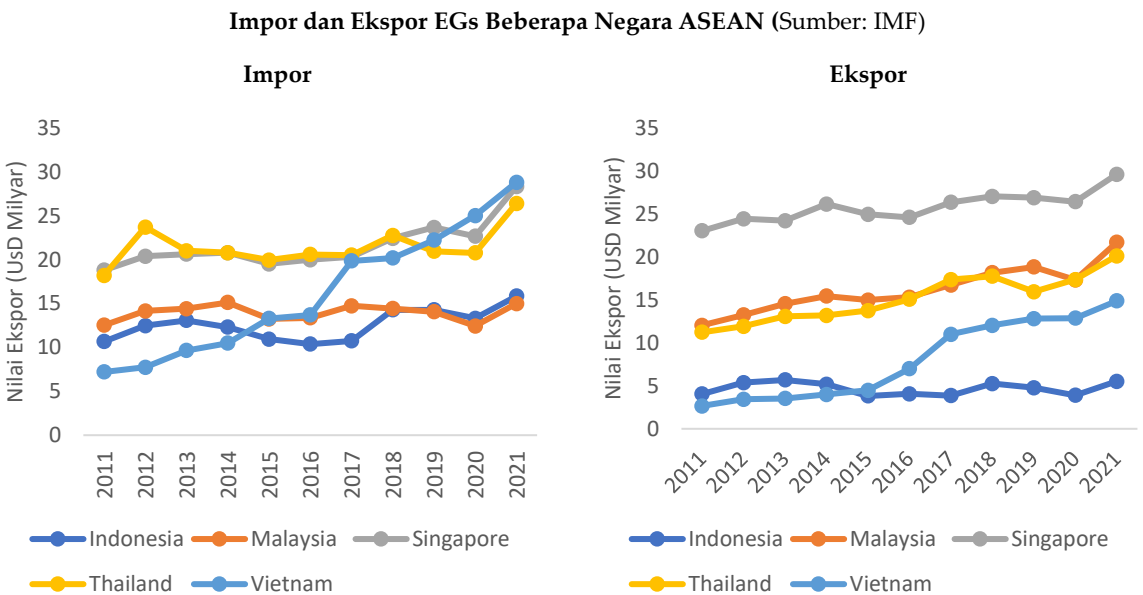
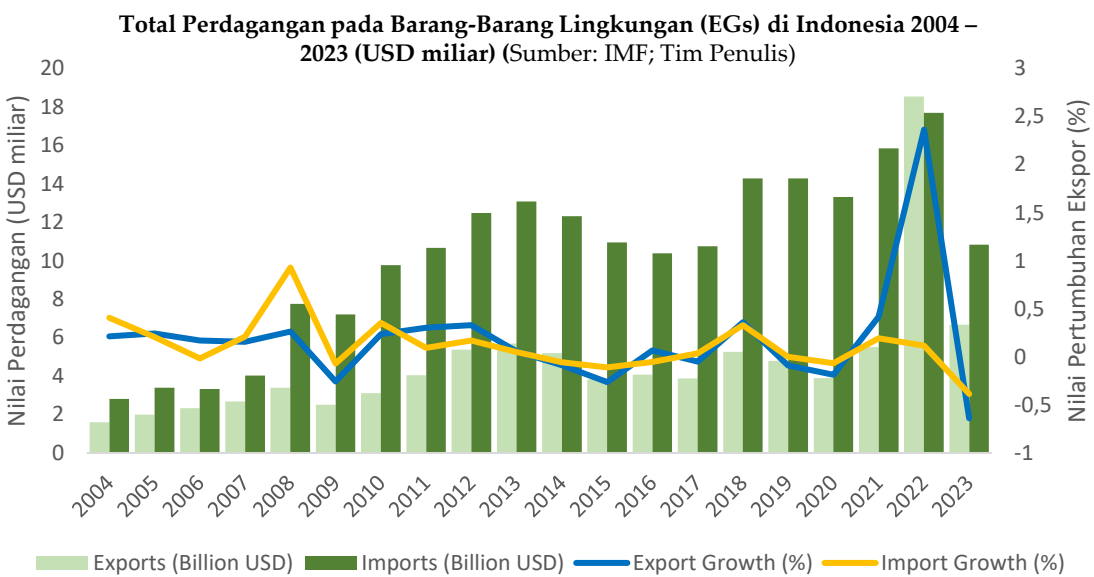
- Kesenjangan tarif antar negara:
1,4% tarif rata-rata di *high-income countries*
7,3% tarif rata-rata di *low-income countries*
- Penggunaan kebijakan non-tarif terhadap EGs cenderung lebih sering diterapkan oleh negara-negara berpendapatan tinggi → patut menjadi kekhawatiran negara-negara berkembang.

Negara-negara perlu meningkatkan komitmennya dalam perluasan akses perdagangan EGs dengan **kebijakan-kebijakan perdagangan yang lebih fasilitatif**.

Tarif dan NTM pada Barang-Barang Lingkungan (EGs) Global (Sumber: WTO)



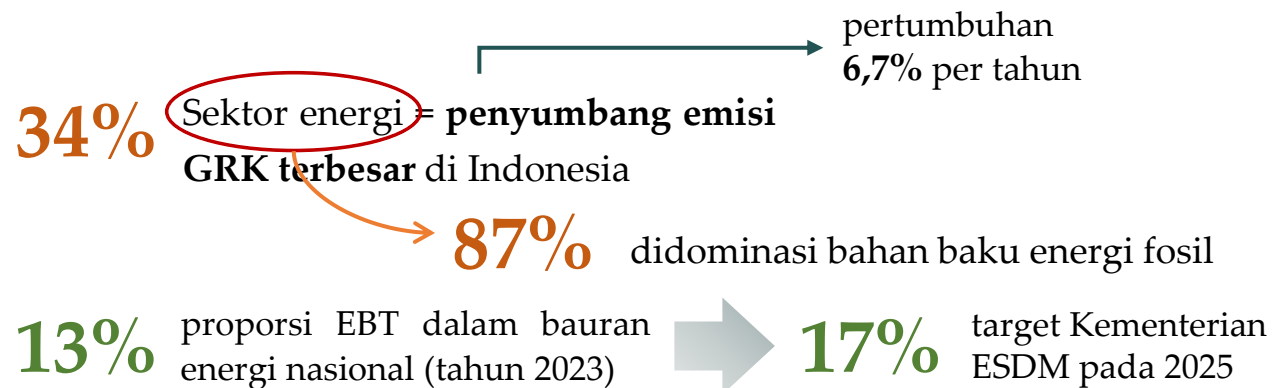
Indonesia memerlukan kebijakan perdagangan yang lebih fasilitatif untuk meningkatkan daya saing dalam perdagangan berkelanjutan



Indikator	Negara			
	Vietnam	Thailand	Malaysia	Indonesia
Indeks Kompleksitas Ekonomi (ECI)	131	34	22	112
Potensi Kompleksitas Hijau (GCP)	41	28	44	36
Indeks Kompleksitas Hijau (GCI)	53	39	42	60

Ranking Indeks Kompleksitas Hijau Indonesia dan Negara Tetangga
Sumber: World Bank

Investasi dalam Bidang Transisi Energi di Indonesia



JUST ENERGY TRANSITION PARTNERSHIP (JETP)

JETP Indonesia = salah satu **komitmen pembiayaan transisi energi terbesar** di dunia, ditandatangani pada November 2022 di KTT G20.

USD 20 miliar
untuk transisi energi

diharapkan dapat menjadi **katalis** untuk menutupi 1/5 total investasi transisi energi hingga 2030

RISIKO DAN TANTANGAN (berdasarkan analisis CSIS dan Tenggara)



Status quo ketenagalistrikan Indonesia yang dimonopoli PLN

Hambatan besar bagi transisi energi Indonesia

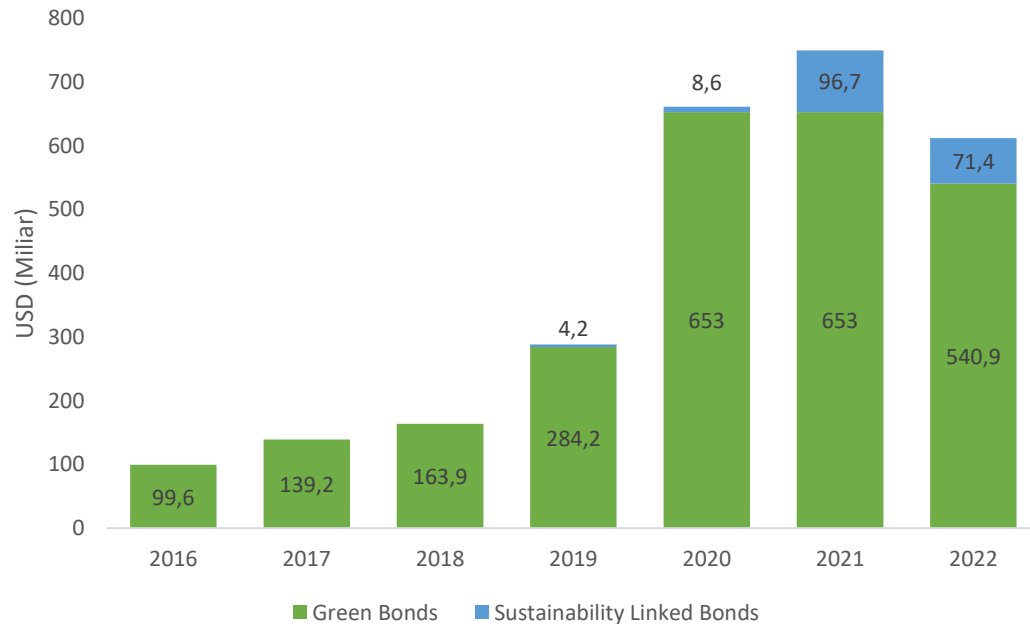
Reformasi industri

- Aksesibilitas pendanaan JETP dari sektor publik masih rendah.
- Kepuasan negara mitra *International Partners Group* demi kelanjutan investasi.
- Tambahan substansi dalam *Comprehensive Investment and Policy Plan* (CIPP) yang meliputi TKDN dan *orderly transition*.
- JETP Indonesia dinilai belum efektif dalam mendanai transisi energi karena Indonesia dan IPG saling menunggu.



Pasar Obligasi Ramah Lingkungan

Penerbitan Green Bond dan Sustainability-Linked Bonds Global (USD miliar)
Sumber: IMF



- Pasar Green Bond global tumbuh hampir 4 kali lipat antara 2018-2021.
- Pasar obligasi ramah lingkungan Indonesia tumbuh 3,7 kali lipat di periode yang sama.
- Mayoritas obligasi ramah lingkungan di pasar Indonesia diterbitkan oleh pemerintah pusat dan badan usaha milik negara.

Taksonomi Hijau di Indonesia



- 2022: OJK menyusun Taksonomi Hijau Indonesia (THI) Edisi 1.0
- 2024: Pengkinian THI menjadi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

Perkembangan Regulasi dan Peraturan terkait Perdagangan dan Investasi Hijau

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

- Sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik terkena dampak cukup signifikan akibat kebijakan TKDN (CSIS, 2020).
- TKDN belum efektif mengurangi permintaan produk input impor karena **lemahnya penegakan dan pengawasan** (Negara, 2016).
- TKDN yang restriktif membatasi akses teknologi dan pengetahuan, merugikan daya saing.
- Terdapat korelasi negatif terhadap produktivitas, output, ekspor, tenaga kerja, dan nilai tambah perusahaan manufaktur di Indonesia (CSIS, 2022)

Regulasi TKDN perlu direformasi dan diharmonisasi dengan kebijakan perdagangan dan industri, mengingat pentingnya integrasi rantai pasokan global dan kemudahan impor bagi investor.

Penyederhanaan proses aplikasi penilaian TKDN dan penerapan kebijakan berbasis bukti diperlukan untuk mengurangi birokrasi, menekan biaya, dan memperkuat posisi Indonesia di forum multilateral.

Perkembangan Regulasi dan Peraturan terkait Perdagangan dan Investasi Hijau

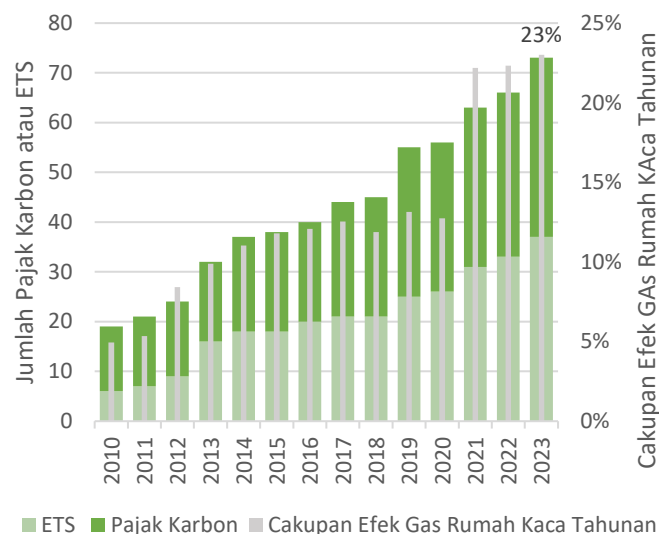
Pencapaian
Komitmen
Iklim Dunia

Penetapan **harga karbon** atau *carbon pricing* menjadi instrumen pasar yang penting

Mekanisme: sistem perdagangan emisi (*emission trading*), kredit karbon, pajak karbon.

RISIKO: Kebocoran karbon atau *carbon leakage*

Memerlukan **penyesuaian perbatasan**, termasuk langkah-langkah perdagangan dan alternatif non-perdagangan



Cakupan Efek Emisi Gas Rumah Kaca oleh Inisiatif
Harga Karbon Global

Sumber: Carbon Pricing Dashboard, World Bank

Kerja sama ekonomi internasional sebagai katalis dan akselerator dekarbonisasi ekonomi

- Harmonisasi harga karbon,
- Perluasan cakupan skema penetapan harga,
- Penghapusan subsidi bahan bakar fosil,
- Pengembangan perjanjian sektoral internasional,
- Pembentukan mekanisme koordinasi untuk mengurangi kebocoran karbon.



Indonesia = salah satu negara penandatangan perjanjian APEC tahun 2012. Namun, Indonesia **tidak berpartisipasi** dalam sebagian besar inisiatif multilateral dan ketentuan lingkungan hidup dalam perjanjian perdagangan, e.g., EGA, TESSD, FFSR.

Kurangnya keaktifan dalam perjanjian-perjanjian internasional

Indonesia belum terikat oleh standar-standar lingkungan secara global

Ketiadaan tekanan eksternal dapat secara signifikan mempengaruhi **ketegasan langkah-langkah Indonesia** dalam memenuhi komitmennya serta kurang terwakilkannya perspektif Indonesia pada harmonisasi kebijakan berkelanjutan global.



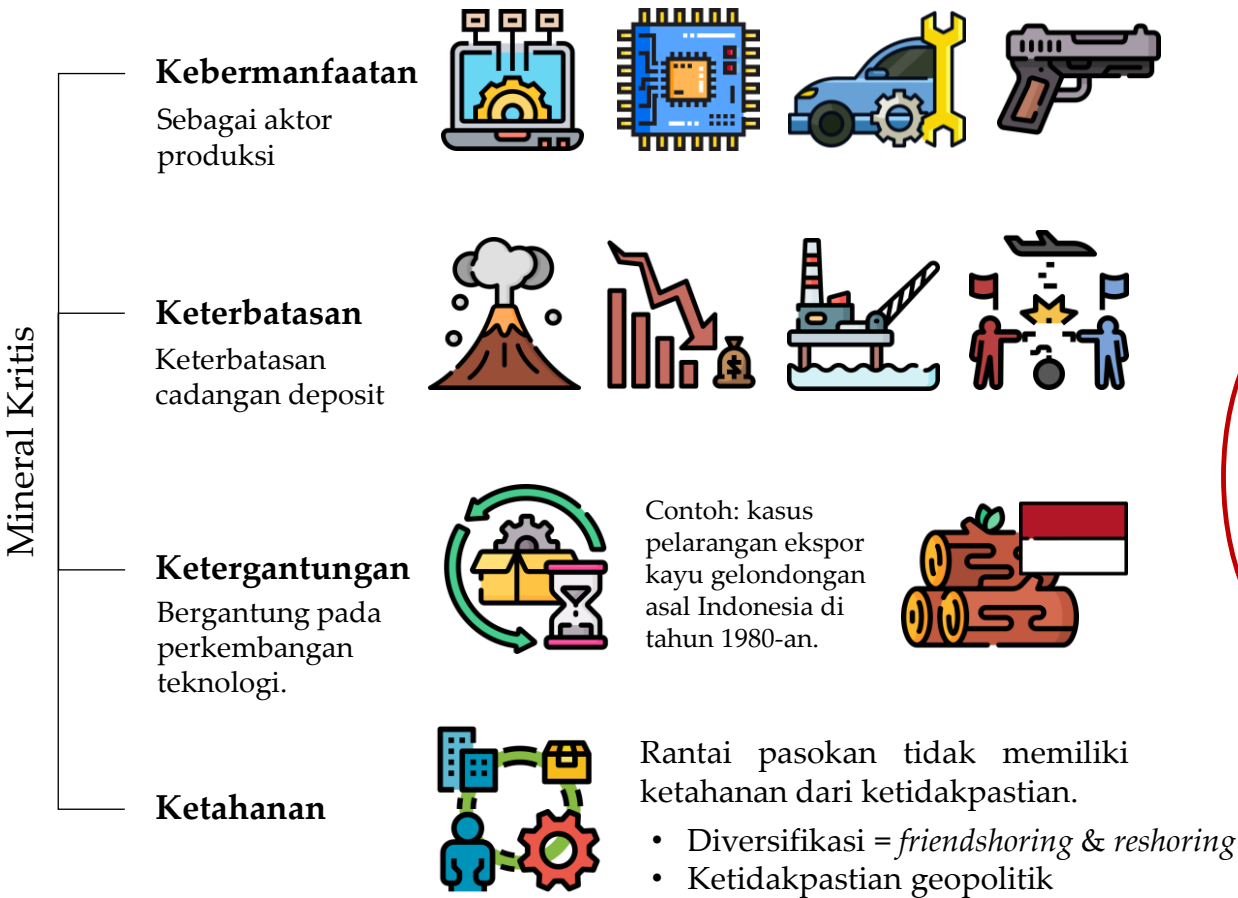
Laporan Khusus

Aspek Keberlanjutan dalam Tata
Kelola Kebijakan Mineral Kritis
di Indonesia

Mineral Kritis

“Mineral yang mempunyai kegunaan penting untuk **perekonomian nasional** dan **pertahanan keamanan negara**; serta memiliki **potensi gangguan pasokan** dan **tidak memiliki pengganti yang layak**.”

(Kepmen Menteri ESDM No 296.K/MB.01/MEM.B/2023)



NIKEL



MK yang menjadi **keunggulan relatif Indonesia**.

14% peningkatan produksi pertambangan nikel dari tahun 2022-2023

50% kontribusi Indonesia terhadap produksi nikel dunia (naik dari 48.3% hanya dalam 1 tahun)

Tahun 2022-2023

1st



Produsen nikel **terbesar** di dunia

42% cadangan nikel Indonesia dari total cadangan dunia

TIMAH



Memungkinkan Indonesia memiliki **keunggulan relatif**.

26% penurunan produksi timah domestik dari tahun 2022-2023

Tahun 2022

2nd



Produsen timah **terbesar ke-2** di dunia

22.8% dari total produksi timah dunia

Tahun 2023

3rd

Produsen timah **terbesar ke-3** di dunia

17.9% dari total produksi timah dunia

KOBAL



Memungkinkan Indonesia memiliki **keunggulan relatif**.

77% peningkatan produksi kobal dari tahun 2022-2023

Kontribusi Indonesia terhadap produksi kobal dunia:

Tahun 2022	Tahun 2023
4.9%	7.4%

Cadangan kobal Indonesia = **5%** dari total cadangan kobal dunia.

Tahun 2022-2023

2nd



Produsen kobal **terbesar ke-2** di dunia (setelah Republik Demokratik Kongo yang menyumbang sekitar 73.9% produksi kobal dunia).

BAUKSIT



Terdapat tantangan lebih sebagai keunggulan relatif Indonesia.

5% penurunan produksi bauksit Indonesia dari 2022-2023

Dipicu oleh **ketidaksiapan industri domestik** merespon larangan ekspor bijih bauksit per Juni 2023

Penurunan kontribusi produksi bauksit Indonesia dibanding produksi dunia:

Tahun 2022	Tahun 2023
5.3%	5.0%

3% cadangan bauksit Indonesia dari total cadangan bauksit dunia

TEMBAGA

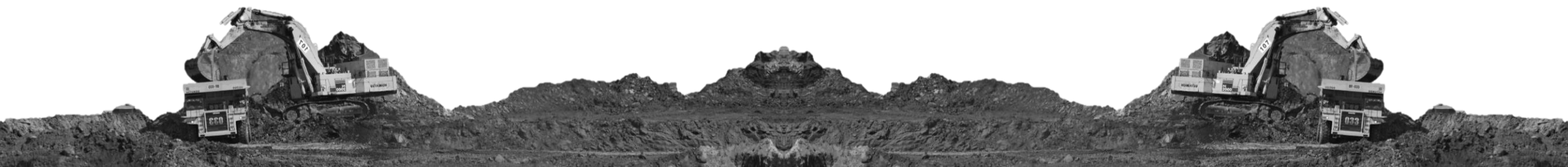


Keunggulan relatif Indonesia terbatas.

11% penurunan produksi tembaga Indonesia dari 2022-2023

2% cadangan tembaga Indonesia dari total cadangan tembaga dunia

Apabila Indonesia melanjutkan larangan ekspor bijih tembaga, Indonesia akan kehilangan peluang untuk meningkatkan partisipasinya dalam rantai pasok tembaga global.



Perkembangan Aspek Keberlanjutan dalam Kebijakan MK

Kebijakan MK pemerintah cenderung **terkonsentrasi pada tujuan (ends)**, namun seringkali lupa mengenai **pentingnya proses (means)** yang berkelanjutan.

Agenda hilirisasi

Turunan UU Minerba No. 4/2009
Perpres No. 55/2019 (TKDN)

Keberlanjutan dan faktor lingkungan dari hilirisasi MK untuk jangka panjang perlu diperhatikan lebih seksama



Global

Sekitar **200 kebijakan** terkait MK dikeluarkan oleh 25 negara dan wilayah di seluruh dunia (>100 baru dikeluarkan beberapa tahun terakhir).

Indonesia

- Keputusan Menteri ESDM No. 296/2023 → babak baru kebijakan MK di Indonesia
- Per 2023, Indonesia memiliki 10 regulasi MK yang menekankan pada aspek keberlanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Pengembangan MK tahun 2023 didorong oleh keinginan untuk memenuhi permintaan teknologi hijau secara global.

Fokus pemerintah: mendorong produksi dan konsumsi kendaraan listrik berbasis baterai dibandingkan memastikan rantai pasok nikel dalam negeri menjadi lebih ramah iklim dan lingkungan.

Belum ada insentif bagi praktik pengolahan MK di hulu yang ramah iklim dan lingkungan

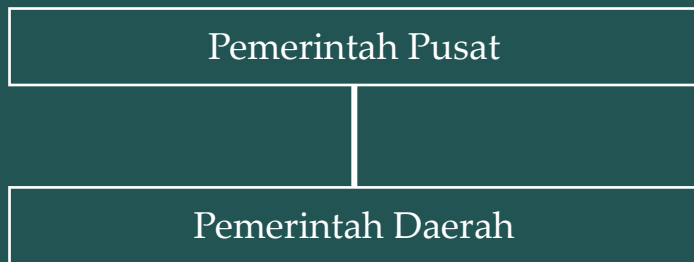


Pemangku Kepentingan Aspek Berkelanjutan dalam MK Indonesia



LAPISAN PERTAMA

Pemerintah bukan suatu **agensi tunggal**; terbagi secara vertikal:



Pokok Masalah

- Keterbatasan kewenangan dan kapasitas pemerintah daerah.
- Komitmen peningkatan inspektur tambang berkualitas belum seimbang dengan komitmen mempermudah IUP.

Desember 2022	Agustus 2022
597 inspektur tambang	3.988 IUP
Maret 2024	
Inspektur tambang N/A	4.163 IUP

- Belum terintegrasinya kekuatan penegakkan hukum di sepanjang rantai pasok.

LAPISAN KEDUA

Pemerintah bukan **agensi tunggal**; distribusi kewenangan di antara K/L di tingkat pusat

Pokok Masalah

Sejauh mana pemerintah pusat memiliki kekuatan penegakkan (*enforcement power*)?

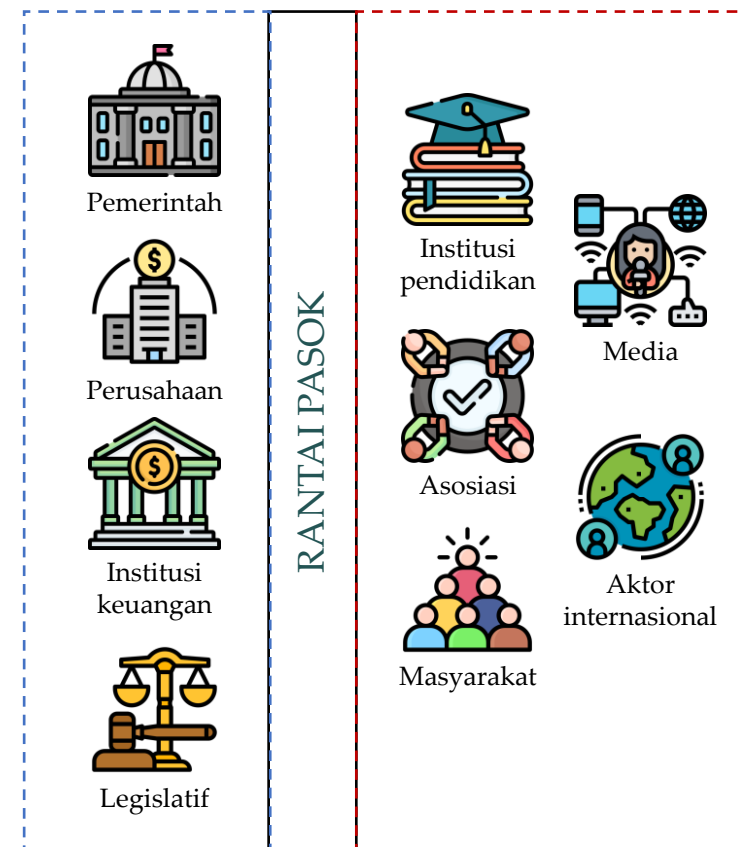
UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 55 Tahun 2022

Resentralisasi kewenangan:

- Meminimalisir kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- Hanya pemerintah provinsi yang dijamin legalitasnya untuk mendapat delegasi kewenangan oleh pemerintah pusat.

LAPISAN KETIGA

Pemerintah sebagai **agensi tunggal** dalam tata kelola mineral kritis yang berinteraksi dengan beberapa pihak.



Pokok Masalah

Tidak semua pemangku kepentingan memiliki pengaruh langsung terhadap rantai pasok.

Belum terintegrasinya kekuatan penegakkan hukum di sepanjang rantai pasok



Gambar 3. Pengambil Keputusan di Sepanjang Rantai Pasok Mineral Kritis di Indonesia

Studi Kasus di Kabupaten Morowali

DAMPAK LINGKUNGAN



Pencemaran udara → peningkatan angka penderita infeksi saluran pernafasan (ISPA) secara drastis



Degradasi kualitas tanah paska tambang (kegagalan reklamasi)



Kontaminasi sungai



Bencana alam banjir (akibat alih fungsi hutan menjadi industri)

PRAKTIK KEPEDULIAN TERHADAP IKLIM DAN LINGKUNGAN

Standar lingkungan yang diterapkan berbeda antara Tiongkok, Australia, Kanada

Kawasan industri yang dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok cenderung abai urusan lingkungan

Faktor **perubahan manajemen** mendorong perhatian lebih terhadap isu lingkungan



Perbandingan Aspek Berkelanjutan dalam MK Negara Lain

Kanada	Australia	Inggris
Mendorong Eksplorasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Inovasi	Mengembangkan Proyek Penting yang Strategis	Mempercepat Pertumbuhan Kapabilitas Domestik
Mempercepat Pembangunan Proyek yang Bertanggung Jawab		
Menumbuhkan Tenaga Kerja yang Beragam dan Masyarakat yang Sejahtera	Menumbuhkan Tenaga Kerja yang Terampil	
Membangun Infrastruktur Berkelanjutan	Membuka Investasi dalam Infrastruktur dan Jasa Pendukung	N/A
Mengedepankan Rekonsiliasi dengan Penduduk Asli	Keterlibatan Bangsa Asli dan Pembagian Keuntungan	
Memperkuat Kepemimpinan dan Keamanan Global	Menarik Investasi dan Membangun Kemitraan Internasional	Kolaborasi dengan Mitra Internasional
	Mempromosikan Australia sebagai Pemimpin Dunia dalam Performa ESG	Penguatan Pasar Internasional

Tabel 11. Derajat Upaya Keberlanjutan dalam Strategi Mineral Kritis Inggris, Australia, Kanada

Memiliki kesamaan sebagai pemilik mineral, anggota OECD, dan merupakan negara *middle power*.



Berkompetisi untuk memperoleh kredibilitas sebagai pemimpin dunia di bidang mineral kritis yang berkelanjutan

Refleksi Penting

- Kepemilikan MK yang melimpah **tidak dapat dijadikan sebagai kekuatan kompetitif**.
- Proses berkelanjutan dapat menjadi **lebih murah dan dapat bersaing** dengan proses yang tidak berkelanjutan seiring dengan inovasi teknologi.
- Indonesia perlu secara strategis melihat **investasi di sektor sumber daya manusia**.

Kerja Sama Internasional untuk Tata Kelola Mineral Kritis

PELUANG

1. Kesepakatan perdagangan bebas



IA-CEPA

Satu-satunya kesepakatan dagang aktif Indonesia yang memiliki ekosistem kendaraan listrik sebagai area khusus.

Indonesia masih banyak bergantung pada permintaan negara-negara mitra terkait agenda berkelanjutan, e.g. IEU-CEPA dan IC-CEPA.

2. Inisiatif geo-ekonomi

Minerals Security Partnership (MSP)

Indonesia belum secara resmi bergabung → perlu dipertimbangkan demi mempertahankan akses terhadap pasar dan investasi barat, serta mempercepat agenda keberlanjutan Indonesia

Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)

3. Institusi keuangan internasional

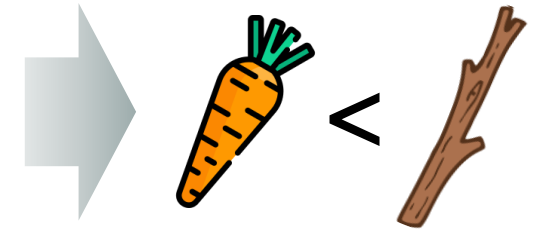


TANTANGAN

1. Sistem internasional yang tidak menentu



Rivalitas AS-Tiongkok diprediksi akan **semakin tajam** seiring dengan proses pemilihan umum di AS.



2. Penyusunan strategi multi-sektor untuk pemenuhan beragam standar keberlanjutan di sektor MK



Minerals Security Partnership (MSP)



3. Sejauh mana Indonesia dapat berlaku sebagai promotor dari agenda MK yang berkelanjutan?



Promosi agenda mineral berkelanjutan melalui KSS, Indonesia AID, dan pengaturan agenda termasuk di ASEAN

Terima Kasih!

dfdlab.org

